

GAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA TKI DI KABUPATEN MALANG

Ani Agus Puspawati

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung

*korespondensi: ani_wardianto@yahoo.co.id

Abstract

The Indonesian Migrant Workers' (TKI) Family Development Policy aims to solve TKI family problems in the fields of economic empowerment, family security and child protection. The study was conducted in Tlogosari Village, Donomulyo District, Malang Regency. This type of research is qualitative. The implementation was unsuccessful because it stopped at the preparation stage. In this study describes the implementation gap that occurs.

Keywords: public policy implementation, Bina Keluarga TKI

Abstrak

Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bertujuan menyelesaikan permasalahan keluarga TKI di bidang pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Penelitian dilakukan di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Implementasi tidak berhasil karena berhenti pada tahap persiapan. Pada Penelitian ini menguraikan tentang gap implementasi yang terjadi.

Kata kunci: implementasi kebijakan publik, Bina Keluarga TKI

Diterima tanggal : 24 September 2018 | Revisi tanggal : 30 Oktober 2018 | Disetujui tanggal : 28 November 2018

PENDAHULUAN

Kebijakan Bina Keluarga TKI diatur dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 20 Tahun 2010. Bina Keluarga TKI adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga TKI untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pada pasal 6 dikemukakan langkah-langkah Bina Keluarga TKI tersebut ada tiga tahap yaitu pertama, persiapan yang meliputi fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang perlunya pembinaan keluarga TKI; mengupayakan kesepakatan; dan membentuk kelompok kerja. Kedua, pelaksanaan yaitu meliputi upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Bina

Keluarga TKI yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh kelompok kerja Bina Keluarga TKI untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan dari anggota kelompok kerja dengan memberikan bimbingan untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan atau kendala.

Persiapan awal program Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang yaitu dengan diadakannya audiensi. Audiensi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Pringgitan di RR. Anusapati Kabupaten Malang. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 2 September 2013. Setelah audiensi tersebut dilakukan, tahap selanjutnya adalah membentuk tim Pokja Bina Keluarga TKI di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Pada laporan pelaksanaan pembentukan Pokja Bina Keluarga TKI Desa Tlogosari

Kecamatan Donomulyo Tahun 2014, disampaikan bahwa hal ini sebagai percontohan di Kabupaten Malang. Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa Desa Tlogosari dengan jumlah TKI 199 orang dari jumlah penduduk 3852 dan KK 1245 orang diharapkan tidak mengirim lagi TKI sebagai pembantu rumah tangga tetapi mengirimkan tenaga kerja yang mempunyai kecakapan khusus seperti perawat, mantri, pekerja pabrika dan TKI yang dikirim harus mempunyai *skill* bukan *unskill*. Selain itu juga harus memutus mata rantai yang ibunya sudah menjadi TKI anaknya tidak menjadi TKI lagi.

Tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh tergantung pada Kabupaten tetapi bergantung dari anggota Pokja semua, karena tugas ini merupakan ibadah dan proyek akhirat. Pada pertemuan pembentukan Pokja Bina Keluarga TKI di Desa Tlogosari tersebut diminta untuk mendata keluarga TKI sesuai dengan forum yang disediakan melalui pertemuan dasa wisma, PKK, pengajian maupun melalui pertemuan yang lainnya. Terdapat usulan dari peserta pokja Bina Keluarga TKI tersebut apabila ada kegiatan pelatihan ketrampilan harus ada pendampingan SKPD terkait. Kegiatan sosialisasi Bina Keluarga TKI telah dilaksanakan di 5 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang, perangkat Kecamatan Donomulyo dan perangkat Desa Tlogosari, tidak ditemukan berkas susunan tim Pokja di tingkat kecamatan dan desa, bahkan mereka lupa akan program Bina Keluarga TKI karena terlalu lama tidak ada aktivitas. Ketidaktepatan susunan tim Pokja tingkat kecamatan dan desa menjadi penyebab salah satu tidak berjalannya implementasi Bina Keluarga TKI di Desa Tlogosari. Tahapan berhenti pada tahap persiapan, kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan sehingga program gagal diimplementasikan. Penelitian ini menarik dilakukan untuk menganalisis gap implementasi yang terjadi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002), mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, hal ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang sebagai daerah yang mengirimkan TKI tertinggi di Jawa Timur, khususnya di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini uraian mengenai gap implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI:

Permasalahan Kurangnya Intensitas Komunikasi Tim Pokja Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Persiapan awal implementasi program Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang yaitu dengan diadakannya audiensi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada Pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya komunikasi berlanjut pada sosialisasi di tingkat propinsi dengan mengundang dari KP3A Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pertemuan Pokja di tingkat Kabupaten sudah dilakukan di awal, namun selanjutnya belum ada *follow up*. Komunikasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sulit dilakukan, sehingga pesan tidak sampai pada pihak terkait. Kesulitan tersebut terjadi karena Pokja di tingkat kecamatan dan desa tidak berjalan. Tidak adanya komunikasi disebabkan karena tidak ada komando dari pimpinan.

Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI ini beranggotakan berbagai SKPD terkait serta LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor 180/092/KEP/421.013/2013. Dalam SK Bupati tersebut terlihat adanya multi *stakeholder*, namun pihak swasta belum terlibat didalamnya. Permasalahan yang terjadi di dalam anggota Tim Pokja Bina Keluarga TKI kabupaten adalah tidak semua tim Pokja mengetahui dan memahami keberadaannya sebagai anggota tim. Hal ini tentunya membawa dampak negatif terhadap proses implementasi program.

Edward (1980), menyatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Seperti yang dikemukakan oleh Howlet dan Ramesh (1998) bahwa aktor dalam proses kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana pola perilaku ini terlibat dalam sebuah kondisi sebagai subsistem kebijakan.

Terputusnya komunikasi menyebabkan tidak terjadinya transformasi informasi sehingga sangat wajar tidak ada kejelasan informasi dan tidak terjadinya konsistensi informasi mengenai program Bina Keluarga TKI. Hal ini menyebabkan *stakeholder* yang seharusnya terlibat belum menemukan kesepakatan. Sebagaimana hasil penelitian dari Matei dan Dogaru (2012) bahwa jika ada koordinasi dalam *stakeholder* maka kesepakatan akan bisa diwujudkan.

Kurangnya Info atau Data Mengenai Kondisi Keluarga TKI

Sosialisasi program Bina Keluarga TKI telah dilaksanakan di Desa Tlogosari pada tanggal 8 Januari 2014. Agenda sosialisasi salah satunya adalah menggali kebutuhan yang diinginkan keluarga TKI agar terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Akibat dari kurangnya data mengenai

jumlah anggota keluarga TKI yang ditinggalkan serta kondisi riil permasalahan keluarga TKI, menjadikan pemerintah belum banyak terlibat dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga TKI, menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga serta terhadap perlindungan anak TKI.

Berdasarkan panduan umum Bina Keluarga TKI dibutuhkan data mengenai kebutuhan yang diperlukan seperti jenis pelatihan kewirausahaan, kebutuhan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga keuangan, data mengenai ketahanan fisik dan nonfisik keluarga TKI serta mengenai permasalahan pengasuhan dan pendidikan anak.

Mazmanian dan Sabatier (1981) menyatakan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis. Hambatan yang terjadi pada implementasi program Bina Keluarga TKI karena tidak tersedianya data yang akurat yang menggambarkan kondisi keluarga TKI. Maka hal serius yang harus dilakukan di awal adalah dengan mengembangkan data keluarga TKI di tingkat desa, langkah ini merupakan kerja-kerja *supporting* dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI.

Lemahnya Top leader Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang

Sikap pimpinan sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan. *Top leader* Tim Pokja Bina Keluarga TKI, ketua Pokja, wakil dan sekretaris belum menggerakkan anggota tim Pokja dibawahnya. Kondisi seperti ini menyebabkan aktivitas tim Pokja terhambat, anggota tim tidak memahami dengan baik apa tujuan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Grindle (1980) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*). Letak pengambilan keputusan masuk dalam variabel *content of policy*.

Belum adanya Kesepakatan Program Kerja di dalam Tim Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Lemahnya *top leader* menyebabkan longgarnya komunikasi di internal tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa. Kondisi tersebut mengakibatkan belum adanya kesepakatan di internal tim mengenai program kerja Bina Keluarga TKI. Program kerja seharusnya dibuat sesuai arahan Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI no.20 tahun 2010 yang terdiri dari bidang pemberdayaan ekonomi keluarga TKI, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI serta bidang perlindungan anak. Kesepakatan program tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga TKI dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga TKI di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

Agar Program Bina Keluarga TKI dapat berjalan, maka Tim Pokja Bina Keluarga TKI harus memahami dan membuat kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai, yang penting keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dimana pelaksanaan program dapat dimonitor (Hogwood dan Gunn 1978; 1986). Dengan bahasa lain Van Meter dan Van Horn (1975) menyebutnya dengan variabel standar/ ukuran dan tujuan kebijakan. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (1981) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi.

Belum Adanya Keterpaduan Hirarki pada Tim Pokja Bina Keluarga TKI di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Terhadap Tujuan

Kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi terjadi di dalam lingkungan tim Pokja Bina

Keluarga TKI Kabupaten Malang, Kecamatan Donomulyo dan Desa Tlogosari. Tidak tercapainya keterpaduan tersebut karena lemahnya koordinasi dan lemahnya *top leader* Pokja Bina Keluarga TKI. Anggota Tim Pokja cenderung bekerja sesuai Tupoksi masing-masing, dan tidak memadukannya dalam ranah program Bina Keluarga TKI di Kabupaten Malang. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1981) mengemukakan keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, sehingga ada keterpaduan hierarki.

Kurangnya Komitmen dari Tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang, Kecamatan Donomulyo dan Desa Tlogosari

Komitmen tim Pokja Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang menunjukkan sikap yang kurang tanggap, belum mencerminkan sikap pro aktif dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Kondisi tersebut juga terjadi pada tim tingkat Kecamatan Donomulyo dan tingkat Desa. Lemahnya komitmen tersebut salah satunya disebabkan karena *leading sector* tidak menggerakkan tim yang ada dibawahnya sehingga masing-masing anggota fokus pada tupoksi masing-masing. Tidak adanya komando, menyebabkan sikap saling menunggu antara anggota satu dengan yang lain.

Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan Edward III (1980). Hogwood dan Gun (1978; 1986) menyatakan bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah

disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang yang sekarang sudah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* program Bina Keluarga TKI belum bekerja secara optimal. Menurut penjelasan dari salah satu staf KP3A saat itu, hal ini karena jumlah anggota di bidang pemberdayaan perempuan hanya tiga orang, kondisi tersebut dirasa tidak imbang dibandingkan dengan banyaknya program kerja yang harus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang yang luas. Sama halnya menurut pemaparan dari staf Kecamatan Donomulyo, karena tugas yang dilaksanakan sangat banyak sedangkan hanya mempunyai satu staf maka dirasa sulit untuk menjalankan semua program yang ada, termasuk program Bina Keluarga TKI.

Van Meter dan Van Horn (1975) bahwasanya kapasitas SDM merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Edwards III (1980) menjelaskan secara lebih rinci, bahwa sumber daya yang dimaksud meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka

Kurangnya Sumber Dana

Program Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang tidak didukung dengan ketersediaan sumber dana yang memadai, kondisi ini disebabkan karena anggaran digunakan untuk kegiatan program yang lain dan di sisi lain program Bina Keluarga TKI ini belum ada dukungan dari pihak swasta. Seperti yang disebutkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1981), Grindle (1980), Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa dana adalah sumber daya yang digunakan, faktor penyokong yang vital dalam terselenggaranya sebuah kebijakan. Menurut Edward III (1980), Fasilitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah fasilitas fisik yang bisa jadi merupakan sumber-

sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Lemahnya Struktur Pokja Program Bina Keluarga TKI

Komitmen tim pelaksana program merupakan hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pasca sosialisasi program, anggota tim Pokja tidak memahami mengenai target luaran yang diinginkan, bagaimana arahan peran masing-masing SKPD, indikator keberhasilan juga belum ada. Lemahnya pemahaman tim Pokja terhadap Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI no.20 tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI menyebabkan lemahnya struktur Pokja Bina Keluarga TKI di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Lemahnya struktur tersebut ditunjukkan dengan lemahnya komitmen anggota tim. Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (SOP). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan (Edward III, 1980).

Tidak Adanya Akses Formal Pihak-Pihak Luar untuk Berpartisipasi Terbuka Bagi Para Aktor di Luar Tim Pokja Bina Keluarga TKI untuk Mempengaruhi Tujuan Resmi

Pada program Bina Keluarga TKI Kabupaten Malang, belum terlihat adanya keterlibatan peran dari aktor diluar tim pokja tersebut, baik dari pihak swasta atau LSM/komunitas lainnya. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat

untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya, dan partisipasi bisa berasal dari pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat dalam proses implementasi itu, Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1981). Maka keterlibatan atau partisipasi *stakeholder* di luar Tim Pokja di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dirasa sangat penting.

Menurut Huntington dan Nelson (1990), partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara-negara yang belum modern, sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

Lemahnya Dukungan Publik

Dukungan publik dalam implementasi kebijakan bisa beragam sesuai dengan kebijakan masing-masing. Pada program Bina Keluarga TKI sangat tampak lemahnya dukungan keluarga TKI. Pasca sosialisasi mengenai program Bina Keluarga TKI, keluarga TKI yang hadir tidak menunjukkan sikap pro aktif. Kondisi ini terjadi karena selama ini belum ada forum yang menyatukan antara pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dengan keluarga TKI yang ditinggalkan. Di sisi lain, belum adanya kerjasama yang bagus antara keluarga TKI di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang agar bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi keluarga TKI tersebut, sehingga sangat terkesan permasalahan keluarga TKI hanya menjadi masalah bagi keluarga yang bersangkutan, seperti masalah ketidakharmonisan hubungan suami istri, perceraian, pendidikan anak dan lain sebagainya.

Faktor lain lemahnya dukungan publik ini terjadi karena paradigma masyarakat yang menjadi kantong-kantong pengirim TKI, anggapan bahwa dengan menjadi TKI kehidupannya akan menjadi sejahtera. Mereka cenderung kembali menjadi TKI jika target materi belum tercapai, kondisi ini disambut baik oleh agen yang

memberangkatkan calon TKI dengan cara memberikan pelayanan terbaik yaitu membantu hal-hal yang sifatnya administratif.

Aminuzzaman (2013) dalam hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder*. Dukungan publik tidak hanya penerimaan publik secara luas terhadap bagaimana memecahkan masalah publik. Dukungan publik bisa berasal dari media massa, pejabat-pejabat daerah atau kelompok kepentingan.

Kurangnya Kebermaknaan Permasalahan Keluarga TKI di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Bagi Stakeholder

Lemahnya kebermaknaan permasalahan keluarga TKI menjadi penyebab program tidak berjalan. Kepala desa menganggap ada permasalahan yang lebih prioritas untuk diselesaikan, seperti infrastruktur dan memberi bantuan keluarga miskin. Tummers dan Bekkers (2014) dalam hasil penelitiannya menegaskan bahwa kebermaknaan terhadap klien mempengaruhi keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Disisi lain Aminuzzaman (2013) dalam hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder*.

PENUTUP

Gap implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI terjadi karena lemahnya pengorganisasian, lemahnya sikap dan komitmen *stakeholder* serta tidak tersedianya sumber daya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuzzaman, S.M. (2013). "Dynamics of Public Policy: Determinants of Policymaking and Implementation in Bangladesh". *Public Organiz Rev* (2013) 13:443–458.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. America. Princeton University Press.
- Hogwood, B.W., & Gunn, L.A., (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Univesity Press.
- Howlett, M. & Ramesh, M., (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.
- Laporan Kegiatan Bina Keluarga TKI Tahun 2014 oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
- Matei, A., & Dogaru., T-M., (2012). "Coordination of Public Policies in Romania. An Empirical Analysis". *1st World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012)*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 81 (2013) Hal. 65 – 71
- Mazmanian, D. & Sabatier, P.A., (1981). *Effective Policy Implementation*. Lexington, Mass, D.C: Heath.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
- Tummers, L. & Bekkers, V. (2014). "Policy implementation, street-level bureaucracy and the importance of discretion". *Public Management Review*, 16(4), Hal. 527-547.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1978). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.

